

SIDANG-SIDANG KHUSUS PBB MENGENAI PERLUCUTAN SENJATA

Bantarto BANDORO*

★ Untuk beberapa tahun perhatian masyarakat dunia dipusatkan pada masalah perlucutan senjata yang tidak terawasi. Tidak disangkal lagi bahwa pemeran utamanya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun kedua negara ini masih menunjukkan kemauan untuk membatasi persenjataan strategis mereka melalui berbagai mekanisme seperti SALT, START dan perundingan-perundingan persenjataan lainnya. Dasar kemauan itu adalah ketakutan mereka sendiri akan terjadinya perlombaan senjata yang tidak terawasi dan tak terkendalikan yang bisa mempunyai akibat-akibat politik, ekonomi dan bahkan militer. Tetapi kesadaran mereka itu sejauh ini ternyata tidak membuka atau menjadi jalan bagi penghentian segala produksi dan penumpukan jenis-jenis persenjataan, apalagi pemusnahan seluruh senjata nuklir yang kini sudah dimiliki oleh sejumlah negara. Menurut laporan *SIPRI Year Book* tahun 1981 perlombaan dan penumpukan senjata dewasa ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan umat manusia dan masa depannya. Faktor utamanya adalah persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mencapai keunggulan.¹ Dari sini masyarakat internasional menyadari bahwa keputusan akhir perundingan persenjataan tidak dapat diserahkan kepada kedua superpower itu saja dan bahwa masyarakat internasional harus diberi kesempatan yang luas untuk ikut mengambil keputusan. Ia bahkan wajib mendobrak kemacetan yang terjadi dalam perundingan-perundingan persenjataan. Melalui forum PBB masyarakat internasional menyerukan perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh. Tema ini kemudian dicantumkan dalam agenda setiap

*Staf CSIS.

¹Lihat *World Armaments and Disarmament SIPRI Year Book 1981* (London: 1981, Taylor & Francis Ltd.). Lihat juga Laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai Tugas Organisasi PBB, September 1981, dalam *Disarmament Periodic Review by the United Nations*, Vol. IV, No. 2.

persidangan PBB mengenai perlucutan senjata, dan di bawah tema ini pula Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1969 dan 3 Desember 1980 menerima Resolusi No. 2602E (XXIV) dan 35/46 yang memproklamasikan dasawarsa 1970-an dan 1980-an masing-masing sebagai dasawarsa perlucutan senjata pertama dan kedua.¹

Semua anggota PBB mengakui bahwa PBB mempunyai peranan sentral serta tanggung jawab utama di bidang perlucutan senjata dan oleh sebab itu harus menjadi pendorong perundingan-perundingan perlucutan senjata, baik unilateral dan bilateral maupun regional. Hal itu didasarkan pada pengakuan bahwa perlucutan senjata, dalam era nuklir ini, merupakan inti penyelesaian masalah-masalah ketertiban dan keamanan internasional, dalam arti bahwa perdamaian dan keamanan internasional hanya mungkin dicapai dengan pengurangan atau pembatasan senjata. Lebih ideal lagi adalah perlucutan senjata yang menyeluruh. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang perlucutan senjata itu PBB mempunyai empat fungsi utama, yaitu (a) sebagai forum di mana perlucutan senjata dicantumkan dalam agenda internasional sebagai masalah utama; (b) sebagai titik fokal perundingan-perundingan persenjataan, dalam arti menetapkan tujuan-tujuan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pada proses perundingan perlucutan senjata multilateral; (c) menjadi sumber informasi perlucutan senjata, mengembangkan program-program studi yang berorientasi pada perlucutan senjata dan tujuan keamanan; dan (d) mengawasi persetujuan-persetujuan perlucutan dan pembatasan senjata dan sekaligus membantu kelanjutan dan implementasi persetujuan-persetujuan itu.² Sesuai dengan fungsinya ini, secara reguler PBB membahas masalah perlucutan senjata dalam komisinya untuk perlucutan senjata atau dalam komite perlucutan senjata Jenewa. Sidang terbesar mengenai perlucutan senjata yang pernah diadakan oleh PBB adalah Sidang Khusus Perlucutan Senjata I dan II, yang masing-masing diadakan tanggal 23 Mei - 1 Juni 1978 dan 6 Juni - 9 Juli 1982. Sidang-sidang khusus ini penting dan banyak mendapat sorotan dunia bukan saja karena besarnya jumlah peserta yang hadir tetapi juga karena merupakan suatu titik balik proses perlucutan senjata, dalam arti bahwa sidang-sidang itu merupakan usaha yang konkrit dan luas untuk menciptakan suatu perubahan dalam tata politik, ekonomi, sosial dan bahkan militer dunia. Tujuan akhirnya jelaslah perlucutan senjata yang menyeluruh, khususnya perlucutan senjata nuklir. Pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada sidang-sidang khusus itu dan pada soal sejauh mana hasilnya memenuhi harapan-harapan masyarakat dunia akan perlucutan senjata. Walaupun demikian, hal ini tidak mengurangi arti penting hasil pertemuan komisi PBB untuk perlucutan senjata dan komite perlucutan senjata Jenewa.

¹Lihat *The United Nations Disarmament Year Book*, Vol. 6, 1981, New York 1982, hal. 8.

PEMIKIRAN DASAR SIDANG KHUSUS

Para ahli masalah perlucutan senjata berpendapat bahwa senjata-senjata nuklir yang ditumpuk sekarang ini lebih dari cukup untuk menghancurkan kehidupan dunia. Selain itu, kegagalan usaha-usaha untuk menghentikan dan membalikkan perlombaan senjata (nuklir) semakin meningkatkan bahaya penyebaran senjata nuklir. Produksi senjata nuklir yang semakin meningkat itu melenyapkan harapan-harapan untuk memperkuat keamanan internasional dan bahkan melemahkan usaha-usaha ke arah itu. Demikianpun pengembangan persenjataan dan angkatan perang serta kompetisi kekuatan lebih lanjut merupakan ancaman terhadap perdamaian yang sulit diperhitungkan. Situasi itu selain mencerminkan tingkat bahaya ketegangan internasional juga mempertajam konflik-konflik di berbagai kawasan di dunia dan membahayakan keamanan semua negara. Semuanya ini kiranya semakin memperbesar kemungkinan pecahnya perang nuklir.¹

Diakui bahwa masyarakat dunia merasa kecewa karena tiada kemajuan fundamental ke arah perlucutan senjata dan perlombaan senjata itu sendiri terus berlangsung dan bahkan semakin meningkat. Dalam menganalisa faktor-faktornya sementara analisis secara umum setuju bahwa perlombaan senjata semata-mata merupakan refleksi dari ketidakpastian dan ketidakstabilan situasi internasional akibat kejadian-kejadian dan perubahan-perubahan dua dasawarsa terakhir. Keunggulan dalam perlombaan senjata akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan politik maupun militer terhadap pihak lainnya. Gagalnya usaha mencapai tujuan itu bukan tidak mungkin akan semakin meningkatkan rasa curiga dan permusuhan di kalangan kekuatan nuklir. Manifestasi kecurigaan dan permusuhan itu bisa berbentuk peningkatan persenjataan maupun angkatan perang. Sementara itu, analisis lain berpendapat bahwa tidak adanya kemajuan berarti dalam usaha dan perundingan perlucutan senjata adalah akibat tidak adanya dialog langsung antara kedua kekuatan nuklir utama, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan nuklir utama ini bahkan berusaha mengembangkan dan mempertahankan posisi kekuatan nuklir mereka tanpa mempedulikan akibat-akibat negatifnya. Dalam hubungan ini banyak negara mendesak agar dirancang suatu ketentuan mengenai partisipasi seluruh kekuatan nuklir dalam sidang-sidang khusus perlucutan senjata PBB. Selain itu, negara besar atau kecil, maju atau berkembang berpendapat bahwa sidang khusus perlucutan senjata PBB itu tidak boleh dijadikan suatu forum konperensi politik untuk semata-mata memajukan kepentingan dan melegalisasi serta mempertahankan posisi persenjataan mereka. Sebaliknya melalui kerja sama konstruktif harus

dicari dan dirumuskan langkah-langkah konkrit perlucutan senjata. Hal ini bisa menimbulkan kepercayaan antar negara dan setidaknya menghilangkan atau mengurangi rasa curiga dan permusuhan. Pendekatan serupa itu kiranya menjadi kepentingan semua negara. Selain itu, inisiatif yang tidak ada kaitannya dengan langkah perlucutan senjata, tetapi dimaksudkan untuk membujuk negara-negara nuklir ke arah proses itu kiranya bisa dianggap sebagai suatu pendekatan komprehensif terhadap masalah itu.

Sidang khusus itu harus mampu menarik perhatian masyarakat dunia dan membuka jalan bagi perundingan-perundingan perlucutan senjata selanjutnya, dan melalui rekomendasi prinsip-prinsip negosiasi, prioritas dan program perlucutan senjata menciptakan kondisi pokok untuk memperkuat kerja sama, saling kepercayaan dan keamanan internasional. Sidang khusus itu harus dilihat sebagai refleksi komitmen dan tekad masyarakat dunia untuk memajukan peranan PBB mencapai perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh.

SIDANG KHUSUS PBB I TAHUN 1978

Pengalaman menunjukkan bahwa alternatif PBB di bidang perlucutan senjata (bilateral, multilateral, regional) tidak mampu merumuskan program konkrit perlucutan senjata. Demikianpun perundingan yang diadakan dalam komite perlucutan senjata Jenewa sering mengalami jalan buntu terutama karena terlalu menekankan perlucutan senjata sebagian-sebagian. Para analis melihat kegagalan itu sebagai akibat tidak adanya orientasi pada perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, khususnya perlucutan senjata nuklir. Lagi pula perundingan itu dibatasi pada perdebatan masalah-masalah prinsip yang terlalu dikaitkan dengan kepentingan nasional dan superioritas negara-negara nuklir. Oleh sebab itu banyak pengamat berpendapat bahwa perundingan yang dilakukan dalam forum itu semata-mata bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kedua superpower.

Proses perlucutan senjata selain tidak menguntungkan juga ditandai dengan semakin meningkatnya perlombaan senjata. Oleh sebab itu dalam pertemuan tingkat tinggi Non-Blok V tahun 1976 negara-negara Non-Blok mendesak agar diadakan sidang khusus PBB mengenai perlucutan senjata. Desakan atau seruan ini terutama didasari oleh suatu kenyataan yang diakui umum bahwa PBB merupakan suatu forum universal yang dianggap mampu menciptakan suasana baru bagi proses perundingan perlucutan senjata. Perhatian khusus Non-Blok ini mencerminkan bahwa perlucutan senjata bu-

ruh umat manusia.¹ Yang jelas adalah bahwa gerakan Non-Blok mendukung demokratisasi hubungan internasional khususnya di bidang perlucutan senjata. Sesuai dengan seruan (rekomendasi) gerakan Non-Blok itu, maka dalam sidangnya yang ke-31 tahun 1976 Majelis Umum PBB mencapai sepakat kata untuk mengadakan sidang khusus semacam itu pada tanggal 23 Mei 1978 sampai dengan 1 Juli 1978. Sidang ini diadakan dalam suasana yang kurang menguntungkan karena tidak dicapai kemajuan berarti dalam usaha menghentikan perlombaan dan produksi senjata (nuklir). Sementara diplomat PBB sendiri bahkan mengatakan bahwa sidang itu justru diadakan karena semakin meningkatnya penjualan senjata dan perluasan senjata nuklir serta penimbunan senjata di daerah-daerah "panas."

Sidang yang berlangsung selama lebih dari dua bulan itu menerima suatu dokumen akhir (final document) yang memuat 129 pasal dalam empat bagian, yaitu pendahuluan, deklarasi, program aksi dan mekanisme internasional perlucutan senjata.² Dokumen akhir ini pada hakikatnya memperluas ruang lingkup konperensi perlucutan senjata Jenewa, mengakhiri dominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dwi-ketua konperensi dan mengembalikan posisi Perancis dan Cina dalam perundingan itu (Perancis dan Cina memboikot forum perlucutan senjata selama 15 tahun). Dokumen itu diterima tanpa pemungutan suara atau secara konsensus. Dalam praktek PBB "konsensus" berarti bahwa delegasi suatu negara tidak cukup kuat untuk menentang suatu naskah yang diajukan. Oleh sebab itu "konsensus" di sini harus dilihat sebagai suatu persetujuan atas seluruh isi naskah. Di lain pihak beberapa negara menyetujui dokumen itu tetapi membuat pernyataan penjelasan (explanatory statement) di mana mereka mengkualifikasi (reserved) posisi mereka mengenai beberapa bagian dokumen yang penting (misalnya Cina dan Perancis). Sikap ini biasanya diambil atas dasar prinsip atau kepentingan nasional, tetapi di lain pihak masih mempertimbangkan kepentingan bersama. Hanya satu negara (Albania) menolak seluruh isi dokumen.³

Pada pokoknya seluruh peserta sidang berpendapat bahwa perlombaan senjata bukan saja akan meningkatkan ketegangan internasional dan mempertajam konflik-konflik regional tetapi juga membahayakan keamanan seluruh negara dan memperbesar kemungkinan pecahnya perang nuklir, biarpun

¹Lihat Homer A. Jack, "The Special Session on Disarmament: The Non Aligned Leadership," *Review of International Affairs*, Vol. XXXVII, No. 656-657, 1977, hal. 14. Lihat juga Ignac Golob, "On the Eve of the Second Special Session on Disarmament," *Disarmament a Periodic Review by the United Nations*, Vol. V. No. 1, Mei 1982, hal. 20.

²Lihat "Struggle for Disarmament," *loc. cit.*, hal. 101-135.

³Lihat *World Armaments and Disarmament SIPRI Year Book 1979* (London: 1979. Taylor &

tidak tercapai sepakat kata mengenai penyebab perlombaan itu. Oleh sebab itu perlucutan senjata di sini harus dilihat sebagai tugas mendesak yang dihadapi masyarakat internasional. Peserta sidang juga menyerukan agar Amerika Serikat dan Uni Soviet mengajukan usul-usul baru perlucutan senjata, tetapi tidak dihiraukan. Keengganan kedua superpower ini mencerminkan pandangan skeptis mereka mengenai perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh. Tetapi di antara peserta ada suatu pengertian bersama bahwa tujuan itu bisa dicapai melalui persetujuan-persetujuan sebagian yang sekaligus merupakan langkah-langkah perlucutan senjata yang efektif. Untuk mencapai langkah-langkah yang efektif ini maka perundingan-perundingan perlucutan senjata harus memberikan prioritas kepada: (a) perlucutan senjata nuklir dan pencegahan perang nuklir; (b) larangan menggunakan senjata pemusnah massa lainnya, termasuk penghapusan senjata kimia; (c) pengurangan angkatan perang dan senjata konvensional secara berimbang, termasuk pembatasan pengalihan senjata konvensional secara internasional; (d) larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional spesifik termasuk senjata yang mempunyai pengaruh yang tidak pilih-pilih (*indiscriminate*); dan (e) langkah-langkah searah (*collateral measures*) di bidang nuklir dan konvensional yang dipola untuk menciptakan kepercayaan internasional.¹

Kalau dokumen akhir ini dikaji lebih dalam lagi maka diketahui bahwa suatu hal yang dianggap baru adalah perlakuan sejalan (*parallel treatment*) terhadap senjata nuklir dan konvensional. Perlakuan serupa itu penting tidak hanya karena senjata konvensional mendominasi pengeluaran militer tetapi suatu konflik senjata konvensional bisa meningkat menjadi perang nuklir. Tetapi perlucutan senjata konvensional ini hanya memenuhi syarat kalau: (a) memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lengkap (*undiminished security*) negara-negara; (b) menekankan angkatan perang dan senjata konvensional negara nuklir; dan (c) membatasi pengalihan senjata konvensional dengan memperhatikan hak negara penerima bantuan atas kebutuhan perlindungan keamanan, penentuan diri dan kemerdekaannya.

Dokumen akhir ini memuat beberapa prinsip perlucutan senjata yang penting. Salah satunya adalah kewajiban negara-negara di dunia untuk memberikan sumbangan yang nyata bagi usaha-usaha perlucutan senjata dan partisipasi dalam setiap perundingan perlucutan senjata. Selain itu, negara-negara nuklir yang kuat dan mempunyai kekuatan militer yang berarti mempunyai tanggung jawab utama atas masalah perlucutan senjata. Cina dan Perancis menentang rumusan serupa itu. Cina berpendapat bahwa perlucutan senjata harus lebih dahulu dimulai oleh kedua superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Demikianpun Perancis berpendapat bahwa penghentian perlombaan

senjata dan perlucutan senjata bergantung pada usaha-usaha awal Amerika Serikat dan Uni Soviet.¹ Pendapat-pendapat ini kiranya tidak dapat dilepaskan dari besarnya arsenal nuklir Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam arti bahwa mereka akan tetap unggul, biarpun semua negara nuklir (termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet) secara bersama memusnahkan arsenal-arsenal itu.

PENILAIAN UMUM SIDANG KHUSUS I

Gagasan Non-Blok untuk mengadakan sidang khusus PBB mengenai perlucutan senjata adalah baik, karena tujuannya melibatkan semua negara di dunia dalam perdebatan perlucutan senjata guna merumuskan strategi perlucutan senjata yang bisa diterima oleh semua pihak. Sidang khusus ini merupakan pertemuan internasional terbesar dalam sejarah perundingan PBB karena secara khusus diabdikan (devoted) pada masalah perlucutan senjata. Masalah-masalah yang diajukan dalam sidang itu dibahas secara lebih mendalam daripada dalam sidang-sidang reguler Majelis Umum PBB. Tetapi sidang itu maupun dokumen yang diterima tidak mampu mempengaruhi dan memaksa negara-negara besar untuk menghentikan perlombaan senjata sama sekali. Perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sejak itu bahkan semakin meningkat dan tidak terkendalikan. Dengan perlombaan senjata itu masing-masing berusaha untuk memperoleh keuntungan-keuntungan politik maupun militer terhadap pihak lainnya. Dokumen akhir yang diterima itu lemah dan tidak sempurna karena terlalu menekankan cara-cara perlucutan senjata yang sebagian-sebagian (piecemeal manner). Laporan *SIPRI Year Book* tahun 1979 bahkan menyatakan bahwa apa yang disebut program aksi dalam dokumen itu tidak lebih daripada suatu katalog langkah-langkah yang "kendor," bagian satu dengan lainnya tidak ada kaitan dan rangkaian logis.² Pada pokoknya sidang itu tidak berhasil merumuskan suatu strategi perlucutan senjata yang koheren. Ia hanya meletakkan dasar-dasar strategi itu. Walaupun demikian, dokumen akhir ini memuat suatu mekanisme perlucutan senjata internasional yang lebih representatif dan diharapkan menjadi dasar pengaturan perundingan-perundingan perlucutan senjata selanjutnya.

SIDANG KHUSUS PBB II

Atas desakan negara-negara Non-Blok, maka dalam Sidang Khusus PBB I diterima suatu keputusan untuk mengadakan Sidang Khusus PBB II mengenai perlucutan senjata.³ Sidang yang merupakan lanjutan dari Sidang Khusus I ini

¹Lihat *World Armaments and Disarmament SIPRI Year Book 1979*, hal. 493.

²*Ibid.*, hal. 518.

diadakan tanggal 6 Juni sampai dengan 9 Juli 1982. Sidang ini berlangsung dalam situasi politik internasional yang tidak menguntungkan. Kejadian-kejadian di Timur Tengah dan Indocina tidak menunjukkan kemajuan berarti, sementara kejadian-kejadian di kawasan "panas" lainnya menjadi lebih serius. Demikianpun perlombaan senjata, khususnya antar superpower, selama empat tahun terakhir semakin meningkat dan membahayakan keamanan internasional; dan lebih dari 50 juta orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan militer dunia. Suatu hasil studi PBB mengenai hubungan antara perlucutan senjata dan pembangunan menyebutkan bahwa produksi industri global untuk tujuan militer pada tahun 1980 mencapai lebih dari 127 milyar dollar, dan 95% dari jumlah itu dikeluarkan oleh negara-negara industri. Selain itu, riset dan pengembangan militer menjadi pusat kegiatan para ilmuwan dan ahli militer. Kegiatan itu meningkat 10 sampai 15% dari seluruh pengeluaran militer dunia dan 85% berlangsung di Amerika Serikat dan Uni Soviet.¹

Ketegangan dalam hubungan internasional sebagai akibat persaingan blok memang tidak dapat dielakkan. Namun, realisasi Sidang Khusus II ini harus dilihat sebagai momentum berarti yang memperkuat usaha-usaha perlucutan senjata sejati. Sidang ini dibuka dengan harapan dapat merumuskan suatu program komprehensif perlucutan senjata dan menjadi kerangka perundingan-perundingan perlucutan senjata di masa depan, baik secara bilateral dan multilateral maupun regional. Program ini sebenarnya bukan program yang memaksa negara-negara untuk melucuti senjatanya, tetapi setidaknya dimaksud untuk mencerminkan kesadaran masyarakat internasional akan bahaya perlombaan senjata, khususnya senjata nuklir, dan perang nuklir. Selain itu, sidang ini merupakan kesempatan penting dan berarti untuk memperbaharui komitmen global mengenai pengawasan dan pengurangan senjata; di sini masyarakat internasional bertindak untuk kepentingan seluruh umat manusia dan bukan semata-mata untuk kepentingan negara-negara kuat tertentu.

Seperti dikatakan di muka, sidang ini berlangsung dalam situasi politik internasional yang tidak menguntungkan. Situasi itu bahkan lebih buruk daripada situasi pada waktu berlangsungnya Sidang Khusus I. Kejadian-kejadian di berbagai kawasan "panas" (misalnya Timur Tengah dan Indocina) dan perlombaan yang cenderung meningkat seharusnya merangsang (galvanize) ke 157 anggota PBB untuk mencapai persetujuan konkrit mengenai langkah-langkah perlucutan senjata.² Tetapi yang terlihat adalah sebaliknya. Kedua superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet, menunjukkan sikap acuh tak acuh dan tidak bersedia mengajukan usul-usul baru. Mereka bahkan saling

¹Lihat Inga Thorsson, "Armaments and Underdevelopment," *Disarmament a Periodic Review by the United Nations*, Vol. V, No. 1, Mei 1982, hal. 14.

menuduh, sementara negara-negara lain sia-sia berusaha mengembalikan proses perundingan pada tujuan semula. Sidang yang semula diharapkan akan merumuskan usul-usul baru dan program komprehensif perlucutan senjata serta merangsang opini dunia berubah menjadi semacam "talking shop" yang tidak berguna. Perbedaan-perbedaan pendapat tetap mewarnai sidang itu. Dengan demikian, harapan-harapan akan tercapainya usul baru, program komprehensif perlucutan senjata dan persetujuan mengenai implementasi keputusan Sidang I buyar.¹ Sidang II hanya mampu menyetujui dua hal yang kurang penting, yaitu meningkatkan jumlah bantuan bagi studi PBB mengenai perlucutan senjata dan kampanye perlucutan senjata dunia yang diusulkan dalam Sidang I.²

Ketidakmampuan sidang untuk menyetujui soal pokok sebenarnya sudah diperkirakan karena situasi internasional (khususnya sebagai akibat membukanya hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet) yang tidak menguntungkan selama empat tahun terakhir. Inga Thorsson, ketua delegasi Swedia pada komite perlucutan senjata Jenewa, sebelumnya sudah meragukan sikap superpower terhadap perundingan perlucutan senjata multilateral. Amerika Serikat dan Uni Soviet bahkan melemahkan dan merongrong perundingan itu.³ Yang jelas ialah bahwa Sidang Khusus II ini berakhir dengan kegagalan. Salah satu faktor kegagalan itu sebenarnya bukan terletak pada mekanismenya tetapi tidak adanya kesediaan dan kemauan politik (khususnya pada superpower) untuk menggunakan mekanisme itu dan menerima orientasi pembatasan persenjataan dan kekuatan militer. Dunia kini menghadapi kebijakan dan praktek-praktek yang sama sekali bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB; ia bukan saja menghadapi kebijakan ancaman tetapi juga penggunaan kekuatan dengan perlombaan senjata sebagai instrumennya. Perlucutan senjata memang sulit dicapai tanpa kesadaran negara-negara besar akan pengaruh negatifnya. Oleh sebab itu perlucutan senjata sejati kiranya hanya bisa dicapai kalau negara-negara yang memiliki persenjataan dan kekuatan militer berarti memobilisasi kepentingan dan kemauan politiknya guna memodifikasi program dan postur militernya, termasuk kebijakan luar negeri dan sikapnya terhadap lingkungannya. Negara-negara besar itu tidak mampu menunjukkan sikap serupa itu dalam Sidang Khusus II ini. Sebaliknya mereka, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, tampil dengan sikap yang saling bertentangan. Sebagai akibatnya sidang itu lebih merupakan arena konfrontasi seperti diakui oleh ketua sidang Ismat Kittani dari Irak.

¹Lihat Aleksander Bakocevic, "Interdependence of Peace, Disarmament, and Security," *Review of International Affairs*, Vol. XXXIII, No. 776-7, Agustus 1982, hal. 11.

²Lihat "Roar of the Arms Race Drowns Tumult in the Streets," *loc. cit.*

³Lihat Inga Thorsson, "Disarmament Negotiations: From Geneva to Paris," *Review of International Affairs*, Vol. XXXIII, No. 776-7, Agustus 1982, hal. 11.

PENUTUP

Perlombaan senjata, khususnya senjata nuklir, sejak lama menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, khususnya karena berbahaya dan mempunyai pengaruh negatif yang tidak menguntungkan umat manusia. Perlombaan senjata dalam beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat dan tidak terkendalikan. Lebih lanjut, dinamika modernisasi kualitas persenjataan yang meningkat cenderung untuk mengganggu perimbangan yang ada. Sementara itu, perundingan-perundingan perlucutan senjata bilateral dan multilateral maupun regional tidak menunjukkan kemajuan berarti, biarpun Sidang Khusus PBB I tahun 1978 berhasil mengeluarkan dokumen yang memuat dasar-dasar dan harapan-harapan perlucutan senjata. Tetapi harapan-harapan itu tidak menjadi kenyataan. Sidang Khusus PBB II tahun 1982 juga tidak berhasil merumuskan program komprehensif perlucutan senjata. Situasi internasional pada saat sidang itu berlangsung bahkan lebih buruk daripada situasi empat tahun sebelumnya. Sementara itu, kesenjangan yang nyata antara ketidak mampuan PBB dan anggotanya untuk mencapai persetujuan mengenai perlucutan dan pengawasan senjata dan bahaya akselerasi perlombaan senjata dan militerisasi global semakin besar.

Pada pokoknya perundingan-perundingan perlucutan senjata bilateral, trilateral, regional dan multilateral gagal memenuhi harapan masyarakat internasional. Kiranya dapat disebutkan tiga faktor utama kegagalan itu. Pertama, tidak memadainya konseptualisasi tujuan dan proses perlucutan senjata atau pengawasan senjata oleh para pengambil keputusan di negara-negara besar. Lagi pula mereka terlalu menekankan konsep "perimbangan" dan "paritas." Kedua, dinamika teknologi militer termasuk riset dan pengembangan (R & D). Teknologi militer ini bukan saja dimaksud untuk mengimbangi tingkat perkembangan sistem persenjataan lawan tetapi juga untuk mengimbangi - kalau bisa bahkan melebihi - kemajuan teknologi yang akan dicapai oleh pihak lawan di masa depan. Hal ini pada gilirannya menimbulkan persaingan persenjataan. Ketiga, kegagalan negara-negara besar untuk memperhatikan atau menghormati prinsip-prinsip fundamental PBB.

Menurut rencana Sidang Khusus Perlucutan Senjata PBB III akan diadakan tahun 1987. Belum dapat dipastikan bagaimana situasi internasional dan perkembangan persenjataan dunia lima tahun mendatang. Tetapi kalau situasi hubungan internasional saat itu jauh lebih buruk, maka sudah bisa dipastikan bahwa hasilnya tidak akan lebih baik daripada hasil sidang-sidang khusus sebelumnya.

